**PERUBAHAN IDENTITAS ETNIS TIONGHOA**

 **DI WATAMPONE, BONE 1966-2006**

Oleh : Sunarti

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

PPs, Universitas Negeri Makassar

Chunanarti78@gmail.com

Penelitian sosio-historis ini bertujuan untuk mengetahui : (1) proses pembentukan identitas sosial budaya etnis Tionghoa di Watampone, (2) perubahan identitas etnis Tionghoa di Watampone pada masa Orde Baru.(3) respon dan perubahan identitas etnis Tionghoa pada era Reformasi. Pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses interaksi dan adaptasi yang terjadi pada etnis Tionghoa di Watampone dalam pembentukan identitas didukung oleh beberapa faktor seperti ikatan kekerabatan dan organisasi sosial, kepercayaan dan pandangan hidup, serta ikatan emosional dan kebersamaan cita-cita. Perubahan identitas etnis Tionghoa di Watampone pada masa Orde Baru dapat dilihat dari beberapa hal seperti perubahan agama dan kepercayaan, perubahan nama, dan perubahan bahasa. Sedangkan perubahan pada era reformasi adalah perubahan identitas sosial politik, agama dan kepercayaan, nama, dan bahasa.

Kata kunci : Perubahan Identitas, Tionghoa

**ABSTRACT**

 This Socio – historical research aims examining (1) the establishing process of sociao-cultural identity of Chinese ethnic in Watampone, (2) the identity changes of Chinese ethnic in Watampone in New Ordeal, and (3) the response and identity changes of Chineseethnic in Reformation Era. Data is collected through observation, interviews and documentation.

 The results of the study reveal that the interaction, process and adaptation in Chineseethnic in Watampone in terms of identity establishment is supported by several factors such as kinship social organization, faith and life perspective, and emotional bond and future achievement. The identity changes of Chinese ethnic in Watampone in New Ordeal can be seen from several aspects such as changing religion and faith, changing name, changing language, whereas, the changes in reformations era are socio-political identity changes, religion and faith, name, and language.

Key words : Chenges Identity, Tionghoa

1

1

vii

vii

vii

vii

1

1

1

vii

vii

vii

vii

vii

**PENDAHULUAN**

Permasalahan identitas Tionghoa adalah fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Identitas merupakan ciri khas yang membedakan antara satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya. Setiap kelompok etnis memiliki karakteristik yang berbeda, di mana perbedaan tersebut dapat dilihat melalui bahasa, adat istiadat, nilai dan norma budaya yang dianut, ciri-ciri fisik, dan ciri khas lainnya yang selama ini lebih banyak dikaitkan dengan simbol-simbol budaya yang digunakan oleh kelompok tersebut.

Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, posisi etnis Tionghoa mengalami pasang surut. Terjadi fluktuasi etnis Tionghoa yang dipengaruhi oleh kondisipolitik di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa etnis Tionghoa berada pada kondisi yang tak menentu, yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Etnis Tionghoa mengalami trauma politik yang dalam. Pergolakan politik lokal, konflik politik-ideologi, hingga munculnya Gerakan 30 September 1965 menjadikan etnis Tionghoa sebagai kelompok masyarakat yang menjadi korban politik dan mangsa konflik, ditambah dengan perasaan sebagai orang asing (*outsider*) menyebabkan orang Tionghoa cenderung mengabaikan persoalan-persoalan yang terkait langsung dengan mereka. Pada masa Orde Baru perlakuan dan peraturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa sangat tajam. Hal ini dapat dilihat dalam keputusan seminar Angkatan Darat I yang dilaksanakan pada bulan Mei 1965 yang menyatakan bahwa di negeri ini terdapat dua golongan penduduk, yang satu bangsa Indonesia dan satu lagi bangsa Tionghoa (Suryadinata, “Peran Kelompok Etnik Tionghoa dan Kebijakan Negara”,dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lapian(editor umum) Susanto Zuhdi (editor jilid 8), *Indonesia Dalam Arus Sejarah*, 2012: 453). Sampai tahun 1998 eksistensi etnis Tionghoa terlihat hanya pada bidang-bidang tertentu, terutama terkonsentrasi pada bidang perekonomian dan sebagian kecil di bidang keilmuan.

1

Perubahan identitas etnis Tionghoa di Watampone mengikuti perubahan sosial politik yang diintrodusir oleh negara. Penyerangan rumah-rumah etnis Tionghoa di Watampone pada bulan November 1965, diikuti tekanan-tekanan politik pada periode awal pemerintah Orde Baru menjadikan etnis Tionghoa terdesak. Sebagian besar dari mereka meninggalkan Watampone. Akan tetapi, seiring dengan perubahan sosial politik dan ekonomi, etnis Tionghoa di Watampone mampu beradaptasi dengan masyarakat lokal dan bahkan menjadi bagian dari perkembangan ekonomi masyarakat Bugis. Kemampuan etnis Tionghoa beradaptasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Bugis Bone yang juga memiliki etos dagang dengan nilai-nilai budaya yang berorientasi ke agama Islam, dan adat istiadat yang kuat merupakan fenomena yang menarik. Selain budaya,agama adalahmerupakan identitas diri yang sangat penting untuk menjadi orang Bugis. Ketegasan budaya dan adat terhadap nilai-nilai yang dianut oleh orang Bugis-Bone menyebabkan tidak mudah untuk menyatakan diri sebagai orang Bugis, namun dalam kasus tertentu, terdapat orang Tionghoa yang mampu merepresentasikan dirinya sebagai ”*Tionghoa-Bone*”, yang membedakannya dengan etnis Tionghoa lainnya. Perbedaan etnis Tionghoa di Bone dengan etnis Tionghoa lainnya di Sulawesi Selatan, bahwa dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan, orang Tionghoa relatif diterima di Bone, khususnya di Watampone dan masyarakat Watampone memiliki kultur terbuka terhadap etnis lain. Masyarakat Bone secara umum dan khususnya diWatampone menganut konsep identitas budaya multikultural, artinya konsep budaya masyarakat Bone bersifat majemuk dan kompleks. Masyarakat Bone mampu menempatkan diri dan menjaga toleransi diantara masyarakat yang ada melalui proses adaptasi.

**BATASAN MASALAH**

Penelitian ini mencakup tiga aspek yaitu:

1. Aspek tematis, aspek temporal, dan aspek spasial. Aspek tematis penelitian ini adalah mengenai identitas etnis Tionghoa di Watampone pada masa Orde Baru.
2. Aspek temporal penelitian ini dimulai dari tahun 1966 sampai tahun 2006. Tahun 1966 dijadikan sebagai awal penelitian karena tahun tersebut merupakan awal dimulainya rezim Orde Baru yang sebelumnya ditandai dengan beberapa peristiwa penting seperti terjadinya G-30-S PKI tahun 1965, dan keluarnya Supersemar 1966.
3. Aspek spasial penelitian ini adalah wilayah Watampone. Watampone sebagai Ibukota Kabupaten Bone dijadikan sebagai batasan spasial.

**KAJIAN PUSTAKA**

**Etnis Tionghoa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etnis merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnis memiliki kesamaan dalam hal sejarah, keturunan, bahasa, sistem nilai serta adat istiadat dan tradisi.

Orang Tionghoa yang ada di Indonesia merupakan imigran kelahiran Tiongkok yang hampir seluruhnya datang dari dua propinsi yaitu Fukien dan Kwangtung. Etnis Tionghoa yang dalam sepanjang sejarah Indonesia menimbulkan kontroversi, karena etnis Tionghoa oleh masyarakat luas sering dikelompokkan sebagai “orang Tionghoa” atau “orang Cina” (Skinner “Golongan Minoritas Tionghoa”, dalam Melly G. Tan (editor), 1979: xi). Namun akibat dari perkawinan campuran dan asimilasi di banyak bagian Indonesia, kita tidak bisa memastikan yang mana tergolong orang Tionghoa, dan yang mana bukan orang Tionghoa berdasarkan kriteria ras. Dalam hal ini, mereka yang asing disebut Tionghoa asing atau WNI keturunan Tionghoa (orang Indonesia Tionghoa), selanjutnya kelompok bersama-sama disebut etnis Tionghoa, karena adanya suatu kelompok yang dianggap mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda dari orang-orang etnis Indonesia.

Menurut Robby Sanger, etnis Tionghoa di Indonesia seharusnya tidak dikelompokkan menjadi pribumi dan non pribumi karena pada dasarnya etnis Tionghoa di Indonesia sama halnya dengan suku bangsa yang lainnya di Indonesia, dengan merujuk kepada dari mana sebenarnya asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, yakni dari Yunan negeri Cina. (Wawancara, Senin, 25 Januari 2016).

**LANDASAN TEORITIS**

Untuk mencapai tujuan penulisan sejarah yang optimal, maka peran teori tidak bisa diabaikan. Teori adalah hal pokok dalam penulisan sejarah, sehingga hasil penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan menceritakan kejadian atau peristiwa secara kronologis prosesual saja, tetapi bermaksud menerangkan dengan mengkaji sebab-sebab kausalitasnya, kondisi lingkungan, konteks sosial kulturalnya, dengan secara mendalam hendak dijadikan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji. Sebagai seorang ilmuan, maka amat penting untuk menentukan ukuran-ukuran tertentu dalam memberikan karakter itu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural sebagai salah satu teori perubahan sosial. Studi mengenai perubahan sosial harus dimulai dengan studi mengenai struktur sosial, yang didefenisikan sebagai tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang dapat tersusun secara vertikal maupun horizontal (Parson dalam Nanang Martono, 2014: 58).

Perlu dipahami bahwa struktur sosial merupakan lingkungan sosial bersama yang tidak dapat diubah oleh orang perorang. Sebab ukuran, pembagian kegiatan, penggunaan bahasa, dan pembagian kesejahteraan didalam organisasi merupakan pembentuk lingkungan sosial yang bersifatstruktural dan membatasi perilaku individu dalam organisasi.Maka pola struktur sosial dapat dipengaruhi oleh jumlah orang yang berbeda-beda, kedudukan seseorang dan peran yang dimiliki individu dalam jaringan hubungan sosial.

Teori-teori klasik fungsionalisme diperkenalkan oleh Comte, Spencer, dan Durkheim, serta fungsionalisme modern yang diteruskan oleh Robert K. Merton serta Anthony Giddens. Di awal-awal kelahiran teori fungsionalisme. August Comte berpikir agar ilmu-ilmu sosial tetap menjadi ilmiah, dan memandang biologi sebagai dasar melihat perkembangan manusia.

Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organik. Artinya, fungsionalisme melihat manusia sebagai sebuah sistem dari beberapa subsistem yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Apabila terdapat salah satu bagian yang tidak berfungsi dengan baik, maka manusia tersebut mengalami kondisi abnormal, atau mengalami kondisi “sakit” ( Martono, 2014:35)

Penekanan yang terjadi pada teori fungsionalisme struktural bersumber pada bagaimana dalam perkembangan tersebut mencakup keragamannya, tercipta sebuah keseimbangan (equilibrium) atau dinamik equlibrium (keseimbangan berjalan). Dalam hal ini, keseimbangan dapat terjadi apabila sistem sosial berjalan dengan baik. Menurut Parson, terdapat empat (4) fungsi penting dan menjadi prasyarat berlangsungnya sistem sosial, yaitu :

1. Adaptasi (adaptation). Pada fungsi ini, sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang kompleks, dan sistem harus dapatmenyesuaikan diri dengan lingkungan serta dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.

Adaptasi sebuah sistem ibarat mahluk hidup, agar dapat terus berlangsung hidup, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada dan harus mampu bertahan ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung.

Berkaitan dengan fungsi adaptasi ini, peneliti akan menelusuri bagaimana pola-pola adaptasi dan relasi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Bugis di Watampone.

1. Tujuan (goal attainment). Dalam fungsi ini, sistem harus memiliki, mendefinisikan, dan mencapai tujuan utamanya, yang merupakan fungsi kepribadian.
2. Integrasi (integration). Fungsi ini harus mampu mengatur dan menjaga hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya.

Intergrasi merupakan suatu keadaan kelompok-kelompok etnis beradaptasi dan bersikap kompromi terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat.

1. Pemeliharaaan pola-pola ( latent pattern maintennance). Sistem harus berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-polaindividu dan kultural.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analitis, berdasarkan sumber-sumber tertulis, dokumen maupun hasil wawancara dari pelaku sejarah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial-historis yang di dalamnya menjelaskan tentang perubahan identitas etnis Tionghoa yang ada di Watampone. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pelaksanaannya terjadi secara alamiah. Menurut Lexi Moleong (2007:11), penelitian kualitatif meliputi kegiatan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Hal senada dinyatakan oleh Margono (2004) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (Library Research), wawancara, studi dokumen. Tahap Pengecekan keabsahan data yaitu kritik Sumber, interpretasi, historiografi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Proses Pembentukan Identitas Sosial Budaya Etnis Tionghoa di Watampone**

Orang Tionghoa yang berada di Watampone, sebenarnya tidak merupakan satu kelompok yang berasal dari satu daerah di Negara Cina, tetapi terdiri dari beberapa suku bangsa yang berasal dari dua propinsi yaitu Fukien dan Kwantung dan membawa kebudayaan suku bangsanya sendiri bersama dengan perbedaan bahasanya. Perbedaan-perbedaan yang ada pada etnis Tionghoa di Watampone menunjukkan identitas masing-masing baik sebagai pribadi maupun sebagai suatu kelompok. Etnis Tionghoa yang ada di Watampone terdiri dari suku Hokkian, Kwantung dan Khe.

Identitas adalah jati diri yang dimiliki seseorang yang ia peroleh sejak lahir hingga melalui proses interaksi yang dilakukannya setiap hari dalam kehidupannya dan kemudian membentuk suatu pola khusus yang mendefinisikan tentang orang tersebut. Identitas dan subjektivitas tidak dapat dipisahkan dan sangat terkait. Subjektivitas adalah menyangkut diri (identitas pribadi) seseorang, di dalamnya tercakup perasaan,emosi, hasrat dan kemauan seseorang. Subjektivitas juga berkaitan dengan keasadaran *(concious*) dan ketidaksadaran *(unconcious)*seseorang (Yudha,2014:1). Etnis Tionghoa di Watampone sebagai suatu komunitas mampu menunjukkan jati dirinya melalui proses interaksi dan adaptasi baik dengan masyarakat sesama etnis Tionghoa maupun dengan etnis Bugis yang merupakan etnis mayoritas.Hal ini sejalan dengan pernyataan Chris Barker bahwa identitas sepenuhnya merupakan suatu konstruksi sosial budaya, artinya tidak ada identitas yang dapat “mengada” *(exist)* di luar representasi atau akulturasi budaya (Barker,2014: 170-171). Lebih jauh Barker membagi identitas menjadi dua kategori yaitu identitas budaya yang menentukan posisi di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan *(sense of belonging)* dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan *(sense of otherness)* (Barker,2005:189-190).

38

Berdasarkan pendapat di atas dapatlah dinyatakan bahwa pembentukan identitas etnis Tionghoa di Watamponedapat terjadi melalui proses interaksi dan adaptasi . Proses interaksi dan adaptasi yang terjadi pada etnis Tionghoa di Watampone dalam pembentukan identitas didukung oleh beberapa faktor seperti ikatan kekerabatan, kepercayaan dan pandangan hidup, dan ikatan emosional dan kebersamaan cita-cita.

1. **Perubahan Identitas Etnis Tionghoa di Watampone Pada Masa Orde Baru (1966-1998)**

Perubahan menurut Machionis, yaitu transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam pada waktu tertentu. Konsep dasar dari perubahan mencakup tiga gagasan yaitu perbedaan, pada waktu yang berbeda dan diantara sistem sosial yang sama(Sztompka, 2007:5).

Perubahan identitas merupakan hal yang lazim terjadi dan termasuk produksi atau konstruksi yang tidak lengkap, tetapi selalu dalam proses perubahan dan dibentuk dari dalam maupun di luar kelompok (Yudha, 2014:93). Hal ini dapat digambarkan bahwa apabila seseorang berada dalam lingkungan masyarakat Tionghoa, maka orang tersebut akan mengidentifikasikan diri dan menyesuaikan “identitasnya” sebagai salah satu dari mereka. Namun ketika seseorang itu berada di lingkungan luar seperti di Watampone, maka orang yang bersangkutan melihat dan menyatakan dirinya sebagai orang Bone. Adanya kenyataan seperti itu menunjukkan jika identitas menjadi sebuah konstruksi sosial yang tidak permanen. Identitas menjadi subjectivitas. Di sinilah kekuasaan bermain dalam menentukan identitas seseorang atau sebuah kelompok komunitas. Identitas berada di bawah permainan sejarah, budaya, dan kekuasaan yang berakar pada masa lalu. Identitas terbentuk oleh diskursus budaya melalui sejarah yang berkaitan dengan permainan kekuasaan melalui transformasi dan pembedaan *(difference)* (Yudha,2014:94).

Berbicara tentang perubahan, tentu melahirkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan pembahasan seperti pertama,Apa sebenarnya yang berubah? kedua, Bagaimana hal tersebut mengalami perubahan? ketiga, Apa tujuan perubahan itu? Perubahan identitas etnis Tionghoa di Watampone tidak terlepas dari fakta yang ada bahwa Watampone memiliki masyarakat yang majemuk sehingga tentunya menjadikan Watampone sebagai wilayah yang multikultur.Perubahan identitas etnis Tionghoasejak zaman Hindia Belanda sampai era reformasi tidak terlepas dari kebijakan negara dan siatuasi lokal Watampone itu sendiri sebagai tempat bermukimnya etnis Tionghoa.

 Terjadinya pemberontakan DI/TII di daerah Bone dan akibat dari terjadinya peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965 membawa pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan etnis Tionghoa yang ada di Watampone. Di Watampone, rumah-rumah etnis Tionghoa yang dianggap simpatisan PKI dilempari, kaca-kaca jendela dipecahkan bahkan dihancurkan. Menurut Andi Yushand, A Kieng salah seorang etnis Tionghoa yang dicurigai turut membantu dan membiayai PKI disandera, kemudian dilepas kembali(Wawancara dengan Andi Yushand 7 Mei 2016). Etnis Tionghoa yang masih dianggap Warga Negara Asing(WNA) diusir untuk meninggalkan Watampone. Akibatnya ada diantara mereka akhirnya menuju Jakarta dan Manado. Namun lebih banyak yang bertahan tetap tinggal di Watampone. Seperti dituturkan oleh Lianna (Lan Lang) bahwa: Nenek saya pernah cerita kalau keluarga kami pernah diusir oleh pemerintah agar meninggalkan Watampone. Namun keluarga kami tetap tinggal karena saat itu hanya ada satu kapal dan kapal tersebut pun sudah penuh muatan, sehingga kami tetap bertahan di Watampone. (Wawancara dengan Lianna,6-05-2016).

Hal senada juga dituturkan oleh Hakim Lewa bahwa:

Kami diusir untuk meninggalkan Kota Watampone dan kakak saya sempat mau pergi tapi tidak jadi juga dengan alasan tidak ada lagi kapal,dan kami mau tinggalkan Bone, mau kemana? (dengan bahasa dan logat Bugis, Pak Hakim berujar,,,*Tega ka melo jokka, meloka lisu kampokku dee to wissengi tega monro*(Kami mau ke mana, mau pulang kampung tapi tidak tahu juga di mana tempatnnya), jadi lebih baik tetap tinggal di Bone)(Wawancara dengan Hakim Lewa,30 Maret 2016).

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa situasi politik nasional mempengaruhi politik lokal memberikan dampak dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Hal tesebut juga terjadi pada eksistensi kehidupan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, khususnya di Watampone.

Pada awal Indonesia merdeka, berada dalam genggaman dan cengkeraman termasuk di zaman Orde Baru yang menghendaki assimilasi etnis Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Tap MPRS No.III/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa assimilasi merupakan satu-satunya jalan bagi etnis Tionghoa untuk meleburkan diri. Perubahan identitas etnis Tionghoa di Watampone pada masa Orde Baru dapat dilihat dari beberapa hal seperti perubahan agama dan kepercayaan, perubahan nama, dan perubahan bahasa.

1. Perubahan Agama dan Kepercayaan

Agama dan kepercayaan sebagai suatu identitas, merupakan hak asasi setiap individu. Tidak ada pemaksaan dan juga tidak menjadi suatu keharusan untuk menganut dan memeluk sebuah agama dan keparcayaan tertentu.

Pada masa Orde Baru, kehidupan beragama etnis Tonghoa mulai terusik. Kebijakan pemerintah dan negara sangat ekstrim. Pemerintah Orde Baru hendak mengikis habis kebudayaan etnis Tionghoa, bukan saja tidak mengizinkan orang Tionghoa mengamalkan tradisi dan adat istiadatnya secara publik, bahkan tidak diperbolehkan merayakan tahun baru *imlek*, *cap go meh*, pembangunan klenteng dan tidak diakuinya Konghuchu sebagai sebuah agama. Aturan dan larangan yang berkaitan dengan adat istiadat dan kepercayan dipertegas pada saat pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No.14/1967*tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia*(Tempo,17 Agustus 2004:36). Undang-Undang ini melarang mengamalkan perayaan hari raya Tionghoa, penggunaan bahasa Tionghoa, adat istiadat di depan umum.Larangan pemerintah Orde Baru terhadap agama tradisional Tionghoa dan adanya kewajiban memeluk salah satu agama resmi saat Orde Baru seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, etnis Tionghoa mulai meninggalkan agama tradisionalnya.Instruksi Presiden No.14/1967 turut mempengaruhi Etnis Tionghoa di Watampone. Pelaksanaan ibadah dan adat istiadat bagi etnis Tionghoa di Watampone terpaksa dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya dilaksanakan di kalangan sendiri atau di rumah masing-masing.

1. Perubahan Bahasa

Pada awal kedatangannya sampai dengan zaman kemerdekaan etnis Tionghoa di Indonesia mempergunakan nama Tionghoanya sebagai namanya pada setiap identitas yang dimilikinya, demikian juga dengan yang terjadi di Watampone. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, masyarakat etnis Tionghoa di Watampone mempergunakan nama Tionghoanya sebagai nama resmi dalam identitas, termasuk identitas kependudukan sampai dengan 27 Desember 1966. Sebelum tahun 1960-an pada masa Orde Lama, Menteri Sosial Moeljadi berusaha mengintegrasikan etnis Tionghoa dengan menyarankan agar warganegara keturunan Tionghoa (Peranakan) mengganti nama mereka menjadi nama yang lebih berbau Indonesia, akan tetapi ini hanya berupa anjuran, dan tidak ada sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar, akibatnyahanya beberapa etnis Tionghoa yang mengganti namanya.

Hal yang berbeda terjadi pada tahun 1966, Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi. Semua keturunan Tionghoa di Indonesia diminta untuk berganti nama dengan nama yang berlafal Indonesia. Selama tahun-tahun pertama Orde Baru, sebagian besar dari orang Indonesia keturunan Tionghoa mengganti nama mereka, karena dengan mengganti nama mereka dianggap sebagai bukti dari kesetiaan politik kepada Indonesia atau identifikasi diri dengan bangsa Indonesia (Suryadinata, 2010:220). Peraturan ganti nama tersebut tertuang dalam Keputusan Presidium Kabinet Ampera No 127/U/Kep—12/1966 tentang ‘*Peraturan Ganti Nama Bagi Warga Negara Indonesia Jang Memakai Nama Tjina*,’ yang ditanda tangani oleh Djenderal T.N.I Soeharto, sebagai Ketua Presidium. Keputusan Presidium Kabinet Ampera dipertegas lagi dengan keluarnya surat edaran No.06/Preskab/6/67, yang isinya menyatakan masyarakat Cina (Tionghoa) harus mengubah namanya menjadi nama yang berbau Indonesia (Tempo, 17 Agustus, 2004;36).

Implikasi dari adanya aturan ini, hampir seluruh etnis Tionghoa di Indonesia termasuk di Watampone, berganti nama menjadi nama yang berbau Indonesia. Perubahan nama ini hanyalah pada tataran identitas formal semata seperti KTP, Akta Kelahiran, Ijazah, namun pada tataran informal seperti dalam pergaulaninternkeluarga nama yang diberikan oleh orang tuanya masih tetap dipergunakan, sebagai nama panggilan, walaupun hal ini seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Perubahan nama ini menambah beban sebelumnya di mana etnis Tionghoa yang memilih kewarganegaraan Indonesia harus memiliki tanda bukti yang disebut dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia yang kemudian disingkat SBKRI yang berdasar hukum Undang-Undang no. 62 tahun 1958 tentang "*Kewarganegaraan Republik Indonesia*”. Kebijakan politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru turut pula mempengaruhi keberadaan dan status kewarganegaran etnis Tionghoa di Indonesia. Kebijakan Politik luar negeri Indonesia yang berkiblat ke barat, maka lewat Undang-Undang Nomor 4/1969, Indonesia membatalkan perjanjian Dwi-Kewarganegaraan dengan Cina (Tiongkok) (Tempo, 17 Agustus 2004:52).

Undang-undang ini berdampak terhadap status kewargenegaraan etnis Tionghoa di Indonesia, yang mana semua warga Indonesia keturunan Tionghoa harus membuat SBKRI-surat resmi yang menunjukkan identitas baru warga keturunan Tionghoa (Tempo, 17 Agustus 2004:52). Undang-Undang tersebut diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Kehakiman yakni terbitnya Surat Edaran Menteri Kehakiman No.JHB3/31/3 Tahun 1978 kepada semua pengadilan Negeri yang inti Surat Edaran tersebut “mewajibkan” kaum peranakan memiliki SBKRI (Mahfud, 2013:130). Persoalan SBKRI tidak saja menjadi “momok” bagi warga Tionghoa, tetapi telah menjadi “duri dalam daging”. Pada hakikatnya SBKRI tidak saja berkaitan dengan kewarganegaraan sebagai status legal (*citizenships-as-legal-status*), tetapi juga dengan cakupan dan kualitas kewarganegaran seseorang yang merupakan fungsi dan partisipasi orang tersebut di dalam komunitas politiknya (*citizhenships-as-discrable-activity*) (Mahfud,2013: 131).

1. Perubahan Nama

Etnis Tionghoa di Watampone memiliki kecenderungan untuk mengganti nama-nama mereka menjadi nama yang sesuai anjuran pemerintah Orde Baru, dalam hal ini nama yang berlafal Indonesia.Berdasarkan temuan di lapangan, proses perubahan nama etnis Tionghoa dilakukan dengan beberapa cara seperti :

1. Memilih Nama Yang Mirip dengan Nama Tionghoanya

Orang Tionghoa yang ada di Watampone, sebagian besar mengganti nama Indonesia mereka dengan nama yang memiliki kemiripan dengan nama Tionghoanya. Seperti nama Cou Ceng Wi mengganti namanya menjadi Alwi. Demikian halnya dengan nama Lan Lang diganti dengan nama Lianna.

1. Mengganti Nama dengan Nama Lokal

Selain mengganti nama dengan nama yang mirip nama etnis Tionghoa, tedapat pula etnis Tionghoa yang mengganti namanya dengan cara mendekatkan dengan nama Bugis seperti Cieng Cieng mengganti namanya secara administrasi menjadi Hakim Lewa.

1. Mengganti Nama Berdasarkan Agama

Nama-nama yang dipakai etnis Tionghoa untuk mengganti namaya menjadi nama Indonesia, etnis Tionghoa di Watampone memilih nama lain yang ada hubungannya dengan agama, seperti Cou Ceng Wi menjadi Alwi, Wen Lai atau Budiman, Hadijah (dengan tidak menyebut nama etnisnya).

1. **Respon dan Perubahan Identitas Etnis Tionghoa di Era Reformasi (1998-2006)**
2. Respon dan Perubahan Identitas di Bidang Sosial Politik dan Hukum

Reformasi dalam bidang sosial politik telah membawa pengaruh yang signifikan. Artinya karena reformasi telah mengubah kehidupan dan kedudukan etnis Tionghoa sejajar dengan etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kebijakan-kebiajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama reformasi bergulir, sejak pemerintahan Presiden B.J Habibie sampai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah memberikan posisi kepada etnis Tionghoa untuk berkiprah sama dengan etnis lainnya yang ada di Indonesia. Meskipun sudah mendapatkan pengaruh positif, etnis Tionghoa Watampone umumnya bersikap apolitis , tidak berminat untuk berkiprah di bidang politik. Hal ini terjadi karena umumnya etnis Tionghoa yang ada di Watampone memiliki kecenderungan untuk mengurus usaha dan bisnis mereka daripada mengurus masalah politik. Seperti menjelang dan saat pemilu oleh Robby Sanger menunjukkan sikap apolitisdengan menegaskan bahwa :

Kami itu yang di Bone (Watampone) apabila ada pemilu baik pemilukada maupun pilcaleg, tidak ada yang bersikap dan menunjukkan mendukung ataupun merasa menolak. Yang pasti kami etnis Tionghoa hanya menunggu hasil. Siapa pun dia, yang tampil sebagai pemimpn misalnya bupati, kami harus mendukung dan mengikuti pemerintahannya. Kami tidak mau sibuk pada saat akan pemilihan, tapi nanti selesai baru kami harus turut mendukung pemerintahannya. Di era reformasi ini, kami sudah merasa lebih dihargai dan diakui sebagai WNI (Wawancara,27 Januari 2016).

1. Respon dan Perubahan Identitas di Bidang Agama dan Kepercayaan

Pada bulan Oktober 1999, pemerintahan Habibie berakhir dan digantikan oleh pemerintahan baru. Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-4. Gus Dur merupakan pemimpin yang dianggap menaruh simpati terhadap kaum minoritas pada umumnya dan pada etnis Tionghoa pada khususnya dengan menghimbau etnis Tionghoa baik WNI maupun WNA untuk bersama membangun Indonesia(Suryadinata,2002:97). Pernyataan di atas tidak terlepas dari kebijakan Gus Dur yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang berisi larangan segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina di Indonesia, dan menerbitkan Keputusan Presiden No.6/2000 yang memperbolehkan warga Cina/Tionghoa mengeskspresikan kebudayaan, termasuk kebebasan menjalankan agama di Indonesia(Tempo,17 Agustus 2004: 37).

Keputusan Presiden No.6/2000 yangkemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Keppres No 19 Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 yang menyatakan bahwa imlek sebagai hari libur fakultatif. Karena jasanya inilah Presiden Abdurrahman Wahid sangat dihormati oleh masyarakat etnis Tionghoa di seluruh Indonesia termasuk juga di Watampone.Gus Dur merupakan pembuka tirai yang selama ini membatasi ruang gerak etnis Tionghoa. Seperti yang dituturkan oleh Pak Robby , bahwa begitu munculnya Gus Dur sebagai Presiden, kami merasa senang dan lega. Bagi kami Gus Dur adalah “penyelamat” etnis Tionghoa. Gus Dur ibaratnya pembuka kran yang selama ini tertutup rapat (Wawancara, 27 Januari 2016). Keppres tersebutternyata membawa implikasi yang baik terhadap kehidupan etnis Tionghoa di Watampone, khususnya mengenai kegiatan beragama dan ritual-ritual kegamaan. Pelaksanaan imlek yang selama Orde Baru hanya di rumah-rumah dan terkesan tertutup, mulai dilaksanakan secara terbuka. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati menetapkan Imlek sebagai salah satu hari libur nasional. Peristiwa ini disambut dengan gegap gempita, karena ini merupakan pertanda bahwa pemerintah mengakui eksistensi etnis Tionghoa termasuk juga budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia (Yudha, 2014:168)

1. Respon dan Perubahan Nama di Era Reformasi

Di zaman reformasi ini, perhatian etnis Tionghoa di Watampone terhadap perubahan nama berkurang bahkan tidak peduli dengan perubahan yang ada. Terkait perubahan nama atau penggunaan dua nama, di era reformasi sejak pemerintahan Gus Dur telah menganjurkan agar etnis Tionghoa kembali mempergunakan nama Tionghoanya, namuntidak banyak etnis Tionghoa yang melakukannya(Suryadinata, dalam Tempo, 17 Agustus 20014). Di Watampone, dalam memberikan nama generasi-generasi berikutnya masih bervariasi, ada yang masih memakai nama marga dan disandingkan dengan nama Indonesia, tetapi ada pula yang tidak menggunakan lagi nama marga. Beberapa etnis Tionghoa yang masih menggunakan dua nama seperti generasi dari Hakim Lewa (Cieng Cing) yang merupakan generasi keempat dari keluarganya yakni Wen Lai (Budiman), Wen Cei (Gunawan), Wen Siang(Kurniawan), dan Siu Mei(Rina). Sementara generasi dari Munawar, yang masih merupakan generasi ketiga tidak lagi memakai nama marga etnis Tionghoa, seperti Freddy, Muliady. Demikian halnya dengan Sriwanty dan Enny Novirianny. Lain halnya dengan keturunan Robby Sanger bahwa anak-anaknya yang merupakan generasi keempat, mendapatkan nama marga dari neneknya, namun tidak mengetahui lagi siapa nama marganya. Hal ini terjadi karena tidak pernah dipakai. Seperti yang dituturkan bahwa :

Anak saya, akta kelahirannya tetap memakai nama Indonesia. Meskipun oleh neneknya diberi nama etnis namun tidak pernah dipakai karena ujung-ujungnya kembali juga ke nama Indonesia. Jadi biarlah tetap memakai nama Indonesia. (Wawancara, 30 Maret 2016).

Dengan melihat fenomena yang ada berdasarkan data yang diperoleh dari informan bahwa umumnya etnis Tionghoa yang ada di Watampone memiliki kecenderungan untuk mempertahankan nama yang berlafal Indonesia dari pada memperjuangkan kembali pemakaian nama etnis Tionghoa. Mereka sudah merasa lebih nyaman dengan nama Indonesia yang melekat pada diri mereka

1. Respon dan Perubahan Identitas Bahasa di Era Reformasi

Meskipun Habibie tidak mengapresiasi dan mengklaim bahwa etnis Tionghoa menguasai perekonomian Indonesia, dan menyatakan bahwa perekonomian Indonesia sebaiknya tidak dikuasai oleh satu saja golongan etnis (Tionghoa), namun Habibie tetap memperhatikan etnis Tionghoa sebagai bagian dari Indonesia. Salah satu bentuk perhatian Habibie adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden No.4/1999, yang memperbolehkan adanya pelajaran dan penggunaan bahasa Mandarin di Indonesia. Dengan keluarnya Instruksi Presiden tersebut, menghapus Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.286/KP/XII/1978 tentang larangan penggunaan bahasa Cina.

Dari hasil penelitian dan pengamatan terhadap etnis Tionghoa di Watampone, Instruksi Presiden No.4/1999 tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap etnis Tionghoa di Watampone. Adanya anjuran yang memperbolehkan kembali etnis Tionghoa untuk menggunakan bahasa Mandarin, tidak serta mertaetnis Tionghoa untuk belajar dan memperdalam bahasa Mandarin tersebut. Hanya anak-anak generasi keempat yang terkadang belajar bahasa Mandarin meski hanya belajar secara online lewat internet. Etnis Tionghoa yang masih termasuk generasi ketiga, lebih senang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Bugis.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

Pembentukan identitas etnis Tionghoa di Watampone dapat terjadi melalui proses interaksi dan adaptasi . Proses interaksi dan adaptasi yang terjadi pada etnis Tionghoa di Watampone dalam pembentukan identitas didukung oleh beberapa faktor seperti ikatan kekerabatan dan organisasi sosial, kepercayaan dan pandangan hidup, dan ikatan emosional serta kebersamaan cita-cita.

Situasi politik nasional dan politik lokal memberikan dampak dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, termasuk eksistensi kehidupanetnis Tionghoa yang ada di Indonesia, khususnya di Watampone. Orde Baru yang diawali dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar 1966 ), telah memberikan peluang, kesempatan dan menjadi jembatan bagi Presiden Soeharto untuk memulai kekuasaannya. Di era Orde Baru melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dengan berbagai kebijakan seperti pelarangan pemakaian huruf Tionghoa, bahasa Tionghoa, Pembatasan surat kabar, penutupan sekolah dan penggantian nama Tionghoa. Kebijakan-kebijakan tersebut telah mempengaruhi perubahan identitas etnis Tionghoa di Watampone. Perubahan identitas etnis pada masa Orde Baru dapat dilihat dari beberapa hal seperti perubahan agama dan kepercayaan, perubahan nama, dan perubahan bahasa.

Tumbangnya rezim Soeharto yang kemudian digantikan oleh B.J.Habibie merupakan awal kebangkitan etnis Tionghoa di Indonesia.. Presiden Habibie memiliki pandangan yang berbeda dengan Soeharto dalam bidang politik.Reformasi dalam bidang sosial politik telah membawa pengaruh yang signifikan. Artinya karena reformasi telah mengubah kehidupan dan kedudukan etnis Tionghoa sejajar dengan etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kebijakan-kebiajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama reformasi bergulir, sejak pemerintahan Presiden B.J Habibie sampai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah memberikan posisi kepada etnis Tionghoa untuk berkiprah sama dengan etnis lainnya yang ada di Indodnesia.

Respon atas perubahan identitas etnis Tionghoa di Watampone di era reformasi tampak dalam pelaksanaan ritual dan agama, sertaperubahan terhadap penggunaan nama, bahasa, dan bidang politik lainnya.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu :

1. Kepada seluruh masyarakat Bone baik etnis Tionghoa maupun Bugis, dan etnis lainnya, khususnya yang ada di Watampone, serta penentu kebijakan untuk dapat mengembangkan multikulturalisme dan toleransi dan menjaga pentingnya toleransi yang selama ini ikut mewarnai kehidupan masyarakat secara umum yang ada di Watampone.
2. Kepada lembaga pemerintah terkait, seyogyanya memberikan perhatian khusus mengenai keberadaan etnis Tionghoa di Watampone yang turut berperan dalam perkembangan Watampone yang sampai saat ini datanya sangatlah minim. Tentunya hal ini sangat diperlukan pula dukungan dari masyarakat setempat. Dan kepada etnis Tionghoa senantiasa membuka diri untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain, guna mengembangkan solidaritas kebangsaan yang lebih luas.
3. Kepada para peneliti, tulisan ini dapat mendorong dan menjadi batu loncatan peneliti selanjutnya untuk memahami lebih jauh mengenai keberadaan dan kehidupan etnis Tionghoa, khususnya di Watampone. Tentunya hal ini sangat perlu didukung oleh masyarakat setempat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Taufik dkk, (editor), 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.

Bahrun, Shaifuddin. 2003. *Cina Peranakan Masyarakat : Pembauran Melalui Perkawinan Antarbudaya :*  Makassar : Yayasan Baruga Makassar

Baker, Chris. 2005. *Cultural Studies*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Cangianto, Ardian. 2013. *Kronologis Hubungan Tiongkok dengan Indonesia serta Arus Migrasi*. Avaliable from: URL: http://web.budaya-Tionghoa.net/index.php/item/3660-kronologis-hubungan-tiongkok-dan-indonesia-serta-arus-migrasi-1. diakses tanggal 14 Agustus 2013.

Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ombak.

Endaswara, Suwardi, 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Jogjakarta: Gajamada University Press.

Erniwati. 2011. *China Padang Dalam Dinamika Masyarakat Minangkabau: Dari Revolusi Sampai Reformasi.* Jakarta: Universitas Indonesia

Hamid,Abu.2007. *Sejarah Bone*. Watampone. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

 Kabupaten Bone

Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Penggunaan Bahan Dokumenter*, dalam Sartono Kartodirdjo *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia : Suatu Alternatif*. Jakarta : Gramedia

Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Mahfud, Choirul. 2013. *Manifesto Politik Manifesto PolitikTionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial :Perspektif Klasik,Modern,Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rosdakarya.

Margono, 2004. *Metode Reseach*. Jakarta: Bumi Aksara.

82

Meleong, Lexy. J. 2007.*Metodologi Penelitian Kualitatif* : Bandung. Remaja

Mely G.Tan. 1979. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia.

Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Poelinggoman, Edward L, (ed). 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2.* Makassar. Balitbangda

Santosa, Iwan. 2014. *Tionghoa Dalam Sejarah Kemiliteran :Sejak Nusantara Sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Seagrave,Sterling. 1999. *Para Pendekar Pesisir : Sepak Terjang Gurita Bisnis Cina Rantau.* Jalarta. Alvabet.

Sjamsudin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogjakarta: Ombak.

Skinner, G. William. 1979. “Golongan Minoritas Tionghoa”*,*dalam Melly G. Tan., editor. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia untuk LEKNAS-LIPI dan Yayasan Obor Indonesia

Subyantoro, Arief & Suwarto, FX. 2006. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suhadi, Machi & Titi Surti Nastiti. 2012, “ Perdagangan dan Politik” dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian (editor umum), Edi Sedyawati & Hasan Djafar (editor jilid 2).*Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta* : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Suryadinata, Leo. 1988. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia

Suryadinata, Leo. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*: *Kasus Indonesia*.Jakarta: LP3ES

Suryadinata, Leo. 2012, *“*Peran Kelompok Etnik Tionghoa dan Kebijakan Negara*”,* dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian (editor umum), Susanto Zuhdi (editor jilid 8). *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Suryadinata, Leo. 2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*. Jakarta: Kompas

83

Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada

Tan, Mely G.2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

*Tempo*. 2004. “Etnis Cina di Zaman yang Berubah” *:*Edisi Kemerdekaan 16- 22 Agustus

Wirrawan, Yerry. 2013. *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar (Dari Abad ke-17 hingga ke-20)* : Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Yudha,Kusuma, I Putu, 2014. Tesis *Perubahan Identitas Budaya etnis Tionghoa di Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan.(*Tidak diterbitkan)

Zein Baqir, Abdul. 2000. *Etnis Cina dalam potret Pembauran di indonesia*. Jakarta: PT. Prestasi.